

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menjadi perhatian bagi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh saat ini terus berkembang dan menunjukkan angka perbaikan dalam meningkatkan pendapatan atau devisa negara. Salah satu sektor tersebut adalah pariwisata yang saat ini telah berkembang dan menjadi salah satu industri terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Anggita permata, 2016).

Sektor pariwisata dapat di optimalkan dengan menata mekanisme yang tepat dan sesuai dalam pengembangan pelayanan pariwisata sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan untuk pembinaan pelayanan kepariwisataan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah daerah Dan Pemerintah Desa , pasal 3 butir ke 2 “Pendapatan Asli Desa bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk mendanai pelaksanaan otonomi desa sesuai dengan potensi Desa sebagai perwujudan Desentralisasi.

Era otonomi daerah sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 tahun 2004, memberikan jalan kepada pemerintah desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan desanya sendiri, UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Peran serta masyarakat dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata. Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang desa, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa menjelaskan bahwa pembangunan desa oleh pemerintah desa yang sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari pusat sekarang dapat lebih leluasa dan bebas dalam mengelola dan mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah kongkrit pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya.

Pemerintah desa khususnya kepala desa dalam membangun dan mengembangkan desa harus mengetahui cara mengelola dan menjalankan pemerintahan dengan baik terutama dalam pengelolaan pendapatan. Baik tidaknya suatu pengelolaan bergantung pada tata kelola pemerintah desa itu sendiri, sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengetahui dan mengerti cara mengelola desa dengan baik.

Mengingat dan menyadari adanya hambatan dalam pembangunan suatu daerah maka perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru, dimana semua kebutuhan masyarakat terjamin sampai ke pelosok desa sehingga dibutuhkan

daerah otonom untuk desa agar bisa mengelola sumber-sumber pembiayaannya untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh (Saputra dan Julianto (2016).

Pendapatan Asli desa juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan suatu desa dalam pelaksanaan otonominya sendiri. (Mangowal, 2013) Seluruh hak pemerintah desa yang diterima sebagai penambahan nilai kekayaan bersih disebut pendapatan desa. Pendapatan desa terdiri atas penerimaan tanah kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya sumber-sumber Pendapatan Asli Desa diharapkan suatu desa dapat mengatur dan mengurus desanya sendiri agar dapat mengoptimalkan suatu desa.

Dapat dikatakan apabila suatu desa memiliki peningkatan pada Pendapatan Asli Desa maka akan semakin besar juga peningkatan kemandirian desa tersebut. Untuk memberikan peningkatan atau pengoptimalan pada Pendapatan Asli Desa, suatu desa dapat meningkatkan pendapatannya salah satu melalui pada sektor pariwisata. Yang mana sektor pariwisata dinilai sebagai sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kemandirian, yang dimana juga sebagai negara memfasilitasi desa melalui Dana Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat. menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa.

Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.

Dalam hal ini sebagai rencana lokasi penelitian di Desa Pandanrejo adalah salah satu desa yang berada dikecamatan Bumiaji kota Batu yang memiliki potensi alam dan budaya yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata. Potensi sebagai daya dukung untuk pengembangan desa wisata Desa pandanrejo adalah inventarisir wisata yang berbasis alam, budaya, sangat kreatif dan sangat terpenuhi. Dan objek wisata tersebut juga merupakan paket wisata yang berdasarkan karakter desa pandanrejo yang dapat menarik wisatawan. Wisata tersebut adalah wisata strawberry yang di lestarikan oleh masyarakat desa pandanrejo yang meskipun pengelolaan secara optimal karena belum adanya perencanaan pengembangan desa wisata yang memadai.

Pengembangan pariwisata di desa pandanrejo atau pun secara umum dikota Batu belum bisa dikatakan belum optimal. Masih banyak kekurangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata. Dari sektor pariwisata yang relatif kecil, menandakan bahwa pengelolaan pariwisata di desa pandanrejo perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Masalah lain yang menjadi kendala dalam rangka pengembangan potensi pariwisata dipandanrejo adalah minimnya sarana prasarana penunjang di lokasi wisata, tetapi Hal lain didukung oleh letak geografis desa. jika pengelolaan yang baik tersebut, maka potensi pariwisata didesa pandanrejo tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli desa.

Berbicara terkait pendapatan asli desa, pariwisata adalah salah satu satu yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah yang mempunyai potensi pariwisata, secara khususnya desa pandanrejo juga menjadi desa yang mempunyai potensi pariwisata yang cukup baik.

Penentuan model strategi dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata sangatlah penting dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan model pengembangan desa wisata yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kesinambungannya. Model partsipatory rural appraisal (PRA) merupakan salah satu model yang tepat untuk studi perencanaan dan pengembangan desa Pandanrejo sebagai desa wisata berbasis masyarakat, Dalam model ini mengkaji keadaan atau kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menyusun perencanaan dan pengembangan desa wisata.

Akan tetapi masih terdapat masalah-masalah terhadap peran sector parawisata dalam meningkatkan pendapatannya, yaitu sektor pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal karena seringkali tidak ada campur tangan dari Pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas akses jalan, mencari wisatawan dan mempromosikan tempat wisata tersebut.

Adanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat membantu daerah wisata dalam mengembangkan potensi wisata di daerah tersebut karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Instansi dari Pemerintah Daerah yang bertugas langsung untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

Oleh karena masalah-masalah diatas Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul **“PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DESA” (Studi pada pariwisata petik Strawberi di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu).**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat desa Pandanrejo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat desa Pandanrejo.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu pengembangan pariwisata yang diperoleh.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui peran sector pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu

### 2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam pengembangan pariwisata.
- b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli desa Kecamatan Bumiaji Kota Batu.